

BANGUNAN FILSAFAT POLITIK TENTANG CIVIL SOCIETY DALAM PEMIKIRAN THOMAS HOBBS

Muhammad Saleh Tajuddin

Abstract:

Hobbes shows human as negative aspect, where human instinc tend to conflict, and war. So, sovereignty has to give state leader absolutely in order the state become strong and every state has to coperate with other in commonwealt paradigm. Hobbes discusses the concept of civil society starting with the concept of human being as human nature, particularly the concept of self, individu, and society. Hobbes looks at that human nature is a creature that affected by irrational, anachy, jelious, and hate, so the human become rude, and bad. This situations are called as primitive civil society. Meanwhile, Hobbes depicts modern civil society as a contradiction with human nature and natural law. Hobbes explains that state is created by individu who want create a piece from human nature, so human being has to make a social contract among individu.

Keynotes:

sovereignty, self, individu, human nature, and state.

I. Latar Belakang

Konsep civil society pada dasarnya lahir di Barat yang bersifat liberal, sehingga civil society selalu dipandang bertentangan dengan negara. Wood mendefinisikan civil society sebagai "sebuah arena kebebasan di luar negara, ruang otonomi, perkumpulan sukarela yang dijamin oleh demokrasi yang telah dikembangkan di Barat."¹ Konsep civil society liberal lahir di Barat yang selalu melihat pertentangan antara civil society dengan negara. Namun konsep yang dikembangkan oleh Ernest Gellner yang digunakan sebagai pisau analisis dalam buku ini melihat bahwa civil society bukan hanya kekuatan institusi yang dapat menyerang tirani politik negara, tetapi lebih pada pusat karakteristik eksistensi kebebasan individu dimana masyarakat dapat masuk dan keluar dari civil society.² Sangat jelas pandangan Gellner yang menekankan posisi individu sebagai aktor sosial yang bebas adalah sebuah realitas otonominya dari sebuah negara. Kajian kritis yang dilakukan oleh Hobbes dan Iqbal terhadap konsep diri dan individu merupakan kerangka dasar atas konsep civil society bagi kedua filsuf tersebut.

¹Ellen Meiksin Wook, *Democracy Against Capitalism: Renewing Historical Materialism* (Cambridge University Press, 1995), h. 242.

²Ernest Gellner, *The Condition of Liberty: Civil Society and Its Rivals* (London: Penguin, 1994).

II. Konsep Dasar Civil Society

Konsep civil society telah dimobilisasi untuk melayani berbagai macam tujuan yang tidak mungkin disosialisasikan oleh sebuah aliran pemikiran tunggal yang dikaitkan dengannya. Wood menekankan bahwa civil society sebagai kekuatan politik adalah selalu kontradiksi dengan *state* (negara). Dalam hal ini, ia menunjukkan posisi liberal dari civil society sebagai lawan dari pandangan Marxisme. Hubungan antara negara (militer, polisi, hukum, administrasi, dan organ-organ budaya) dan non-negara (regulasi pasar, privasi yang dikendalikan atau sukarelawan yang diorganisir) dapat didefinisikan dalam term politik versus sosial, publik versus hukum, propagan dan versus publik opini.

Definisi ini meliputi jarak yang luas terhadap institusi-institusi dan hubungan-hubungan rumah tangga, persatuan perdagangan, asosiasi sukarelawan, dan gereja-gereja berhadapan dengan ekonomi kapitalis.³ Menurut Walzer, civil society menetapkan hubungan *network* yang diformat demi keluarga, keyakinan, kepentingan dan ideologi. Masyarakat Eropa Tengah dan Timur misalnya, memiliki versi yang cukup ketat tentang civil society dibawah pengaruh komunisme, dimana kekuatan negara mengacaukan sendi-sendi kehidupan sehari-hari. Tindakan pertama adalah menciptakan demokrasi baru dengan menolak Eropa Timur untuk memperkuat perdebatan civil society dan mengidentifikasinya dengan gerakan-gerakan demokrasi. Oleh karena itu, civil society dapat dibangun melalui perserikatan-perserikatan, gereja-gereja, partai-partai dengan gerakan-gerakan politik, kerjasama-kerjasama, jalinan tetangga yang baik, dan aliran-aliran pemikiran.

Secara umum dipahami bahwa ide civil society memiliki akar-akar sejarah dalam peradaban Barat dan merupakan sebuah konsep yang sudah ada sejak zaman Yunani. Kohen dan Arato mengatakan bahwa versi awal dari konsep ini diperkenalkan oleh Aristoteles ketika ia menggunakan istilah *politika koinania* (sosio politik) yang menitikberatkan pada sifat alamiah manusia dengan istilah *zoon politikon* (manusia sebagai politik binatang). Istilah ini digunakan untuk menggambarkan sosial politik dimana setiap anggota masyarakat memiliki hak mengeluarkan pendapat yang sama dalam hukum. Aspek hukum ini dianggap sebuah etos yang memiliki norma dan nilai yang tidak hanya berkaitan dengan prosedur tetapi juga sebuah kebijakan yang esensial bagi setiap interaksi dalam masyarakat.⁴

Menurut Aristoteles, oleh karena keberadaan sebuah etos antara rumah tangga dan negara (*oikos dan polis*), maka tidak ada perbedaan mendasar antara negara dan masyarakat sebagaimana dikenal dalam masyarakat tentang teori politik modern.⁵

³Ellen Meiksin Wood, *Democracy Against Capitalism: Renuweing Historical Materialism* (Cambridge: Cambridge University press, 1995), h. 231.

⁴Jean L. Cohen dan Andrew Arato, *Civil Society dan Political Theory* (Massachusetts: MIT Press, 1992), h. 72

⁵*Ibid.*

Ide-ide Aristoteles kemudian mempengaruhi pemikiran Romawi. Meskipun tidak ada perbedaan-perbedaan yang signifikan, Cicero mengembangkan konsep civil society melalui idenya yaitu *societas civilis*. Thomas Aquinas kemudian mengembangkan ide ini di Abad Pertengahan dengan merujuk kepada *city state* (negara kota). Konsep ini secara berangsur-angsur dikembangkan dan disatukan dengan konsep kekuasaan kerajaan untuk mengembangkan kerajaan, kota, dan segala macam kerjasama institusi yang menyatu. Salah satu ide yang paling terkenal dari Aquinas adalah *societas civilis res publica*.⁶

Teori Aquinas dengan cepat berkembang di Era Modern, khususnya di abad ke-18. Kemunculan civil society di Barat pada Abad ke-18 merupakan konsekuensi logis dari krisis umum sebagai akibat dari perubahan yang menyebabkan kemunculan ekonomi pasar (misalnya komersialisasi tanah, buruh, dan modal), penemuan ilmiah dan revolusi sosial. Disaat yang sama, paradigma masyarakat tradisional didasarkan atas agama yang diperselisihkan. Wood mengatakan:

The very particular modern of civil society – a conception that appeared systematically for the first time in the eighteenth century – is something quite distinct earlier of society. Civil society presents a separate sphere of human relation and activity, differentiated from state but neither public nor private of perhaps both at once, embodied not only a whole range of social interactions and the public sphere of the state, but more specially a network of distinctively economic relation, the sphere of the market place, the area of production, distribution and exchange.⁷

Dalam kaitannya dengan aspek ekonomi, Seligman melihat beberapa kasus munculnya konsep civil society disebabkan oleh munculnya pasar bebas, seperti doktrin Kristen Protestan yang membedakan negara dengan masyarakat. Sementara dalam aspek politik, dominasi gereja atas seluruh aspek kehidupan di Barat, khususnya aspek pemerintahan, memunculkan sebuah ide cemerlang di kalangan filsuf untuk mengantisipasi persoalan pada saat itu. Salah seorang filsuf yang memiliki perhatian besar pada aspek ini adalah Thomas Hobbes (1588-1679).

III. Manusia dalam Pandangan Hobbes: Konsep Dasar Civil Society

2.1. Konsep Diri

Konsep diri dari para pemikir biasanya didasarkan pada aspek internal manusia, terutama aspek psikologi. J.J. Rousseau memandang bahwa dalam diri manusia terdapat sifat-sifat terpuji, seperti sifat polos, mencintai diri secara spontan, dan tidak egois. Peradaban serta kebudayaanlah yang menjadikan manusia kehilangan sifat aslinya. Sementara itu, Hobbes melihat bahwa manusia adalah makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional,

⁶*Ibid.*

⁷Ellen Meiksins Wood, *Democracy Against Capitalism: Renewing Historical Materialism* (Cambridge University Press: Cambridge, 1995), h. 239

anarkis, saling iri, serta benci sehingga menjadi jahat, buas, dan kasar. Meskipun wilayah pembahasan diri dilihat dari aspek psikologi adalah bernuansa metafisik, Hobbes tetap pada pendirian filsafatnya yang bersifat materialism mekanik.

Hobbes melihat adanya unsur materialisme dalam metafisika bersamaan dengan daya tarik pandangannya tentang kemurnian fisika-psikologi yang mengklaim bahwa proses mental adalah tidak lebih dari gerakan-gerakan tengkorak setiap individu. Daya tarik pandangan Hobbes dengan gerakan tersebut adalah hasil pertemuannya dengan Galileo berdiskusi sepanjang perjalanan tournya. Hobbes menyenangi pandangan Galileo bahwa segala sesuatu dalam gerakan (bahkan gerakan bumi) tak terkecuali sebuah kekuatan adalah sesuatu yang dilatih. Karenanya, Hobbes lebih tertarik dalam *motion* (gerakan) daripada dalam *matter* (materi) itu sendiri.⁸

Hobbes kemudian membawa ide gerakan tersebut ke dalam pembahasan psikologi. Ia mencoba menganalisis konsep motivasi sebagai sebuah dorongan sebagai kelanjutan dari gerakan mendorong ke depan atau gerakan menarik kembali. Dengan jalan seperti ini, pertentangan-pertentangan seperti, suka dan tidak suka, cinta dan benci, senang dan sedih adalah dikategorikan sebagai *unsatisfiable passions* atau nafsu-nafsu yang tidak pernah puas, sebab (anda tidak akan pernah merasa cukup gembira, cinta, dan seterusnya). Ada pula *aversive passion* atau nafsu yang bersifat menentang, sebab seseorang merasa tidak suka atau membenci orang lain disebabkan oleh perasaan jijik.⁹

Hobbes memandang manusia yang terdiri atas bodi, dan kemungkinan dalam waktu yang relatif singkat, bodi-bodi tersebut selalu *in motion* (bergerak). Hobbes mengakui aspek psikologi manusia, tetapi bukan yang menggerakkan bodi manusia. Sejak gerakan-gerakan ini diatur oleh hukum-hukum alam secara fisik, maka aspek psikologi dikeluarkan dari fisik. Menurut Hobbes, aspek psikologi sering dibahas dalam ilmu filsafat moral. Dasar pemikiran Hobbes tentang ilmu fisika adalah diistilakan dengan *endeavor* (upaya). *Endeavor* adalah sebuah *motion* (gerakan) yang dibuat lebih kecil *space* dan waktu yang dapat diberikan. Bagi Hobbes, unit-unit yang terukur adalah konvensional, dan geometri, seperti "ukuran bumi" memiliki realitas fisik, bukan obyek-obyek atau abstraksi-abstraksi dari obyek buku.¹⁰

Bagi Hobbes, *endeavour* adalah *motion* yang dibuat melalui kedalaman sebuah poin. Akal adalah poin-poin dari bodi dan setiap bagian dari badan memiliki sebuah besaran. Namun, ketika sesuatu dipertimbangkan sebagai sebuah poin, maka besarnya tidak dapat dihitung. Sebuah obyek yang besar seperti bumi dapat dipertimbangkan sebagai sebuah poin, bahkan bumi adalah sebuah relatif poin terhadap garis yang dibentuk oleh elips-nya. Jadi, poin-poin seperti unit-unit yang terukur adalah entitas konvensional. Meskipun mereka,

⁸Lihat J.P. De Lucca, Thomas Hobbes, Quaderno Filsufi and Classici. www.swif.it, h. 3

⁹Lihat *ibid.*, h. 4

¹⁰Lihat A.P. Martinich, Thomas Hobbes, *op. cit.*, h. 104.

seperti konsep-konsep geometri, adalah biasanya diduga sebagai abstrak, namun menurut Hobbes adalah bukan rekonstruksi rasional.¹¹

2.2. Naluri

Berbeda dengan Iqbal, sebagai filsuf yang bercorak materialisme eksistensial, Hobbes menolak intuisi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ia lebih menerima pengetahuan berdasar pada pengalaman manusia. Sebagai pemikir eksistensial transedental, Iqbal mengakui intuisi sebagai sumber pengetahuan tertinggi manusia, sedangkan Hobbes lebih memandang manusia sebagai naluri kebinatangan yang digerakkan oleh nafsunya.

Pandangan Hobbes tentang manusia berawal dari pertanyaan 'apa yang menggerakkan manusia?' Ia melihat bahwa manusia mempunyai setumpuk material yang bekerja dan bergerak menurut hukum-hukum ilmu alam, jiwa dan budi dianggap sebagai bagian dari proses mekanis dalam tubuh. Hobbes menganalisis faktor penggerak manusia adalah psikis manusia, yakni nafsu sebagai naluri kebinatangan. Nafsu yang paling kuat dari manusia adalah nafsu (*passion*) untuk mempertahankan diri, dan ketakutan akan kehilangan nyawa. Maka dari itulah, manusia akan cenderung berada di kondisi yang selalu berkonflik (*Homo Homini Lupus*).¹²

Hobbes seharusnya juga memahami pemikiran manusia sebagai sebuah gerakan yang memiliki sebuah penyebab eksternal, walaupun ia memberinya sebuah status khusus, sebab pemikiran adalah pemandangan umum tentang keseluruhan bodi di dunia ini yang selalu menghasilkan hal yang sama seperti penyebab sebuah perputaran universal.¹³ Hobbes menjelaskan emosi atau nafsu sebagai hasrat atau selera (*appetites*) yang dimiliki manusia. Selera tersebut selalu berkaitan dengan pengetahuan yang didasarkan atas pengalaman. Hobbes memandang bahwa penampilan ilmu pengetahuan adalah selalu diregulasikan oleh hasrat tadi.¹⁴ Hal ini berbeda dengan pemahaman kaum rasionalis seperti Descartes yang mendasarkan pengetahuan manusia dari akal. Hobbes menyangka bahwa dunia ini memiliki universal tertentu dan penampilan yang tidak akan berubah, dan keuniversalan penampilan dunia ini adalah disebabkan oleh konsepsi-konsepsi yang kita terima yang disebutnya sebagai *universal laws of nature* (hukum-hukum alamiah universal).

Pertanyaan yang muncul adalah dari mana kekuatan yang dimiliki oleh manusia itu bisa bergerak? Descartes menjelaskan bahwa kekuatan manusia atau tendensi bodi manusia untuk bergerak merupakan ekspresi dari kekuatan Tuhan. Descartes membedakan antara *motion* (gerakan) dan tendensi untuk bergerak, tetapi Hobbes mengatakan bahwa *conatus* pada dasarnya adalah *motion* (gerakan). Hobbes menjelaskan bahwa gerakan awal yang dimiliki oleh

¹¹Lihat *ibid.*, h. 105

¹²Lihat Juhani Pietarinem, Hobbes, Conatus and Prisoner's Dilemma, IIAIAEIA University of Turku, Finland, <http://www.thomas-hobbes/conatus-and-prisoner-dilemma.htm>, h. 3

¹³Lihat *ibid.*

¹⁴Lihat Thomas Hobbes, *op. cit.*, h. 6

manusia pada dasarnya adalah internal permulaan gerakan hewani,¹⁵ yang secara umum lebih dikenal dengan istilah instink atau naluri kebinatangan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Hobbes melihat potensi internal manusia adalah naluri kebinatangan atau nafsu (*passion*) sebagai tumpukan material mekanik yang menggerakkan manusia sekaligus sebagai sumber pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman manusia. Itulah sebabnya Hobbes selalu memandang manusia itu negatif sebagai sifat alamiah yang memiliki hasrat untuk bersaing yang berujung pada konflik. Dasar pemikiran potensi internal manusia Hobbes tersebut sangat penting dibahas untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangannya tentang individu manusia sebagai konsepsi dasar pandangannya tentang civil society.

2.3. Individu

Liberalisme modern dengan demikian dapat dilacak dalam individualisme metodologis Hobbes. Oposisi dalam paham liberal antara negara dan civil society diteorisasikan pada era ekspansi pasar, transformasi ekonomi, dan munculnya kelas sosial baru di Eropa. Individualisme metodologis Hobbes setidaknya tampak dalam dua hal: *Pertama*, seluruh badan korporasi bersifat artifisial dan konvensional. *Kedua*, realitas secara hakiki bersifat individual. Kebebasan dan kekuasaan selalu berada dalam "satu paket" karena kebebasan akhirnya dimengerti sebagai "tiadanya oposisi eksternal atau halangan-halangan eksternal." Individu-individu atomis adalah halangan eksternal. Selain itu, negara menjadi semacam *external impediment* (halangan internal) yang mengancam kebebasan individu. Maka, negara dalam konsepsi politik liberal, lahir sebagai buah persetujuan antar individu dan kekuasaannya adalah kepanjangan tangan dari persetujuan individu-individu. Di sini tampak kaitan logis dan metodologis antara individualisme atomistik dengan konstitusionalisme liberal. Ini berarti konsepsi *state of nature* dari Hobbes, sampai pada sebuah kesimpulan yang sama tentang hubungan negara dan civil society karena koneksi ontologisme antara individualisme dan kepemilikan (hak milik pribadi).

Dalam bukunya *De Cive*, Hobbes mengawali tulisannya dengan menyerang konsep Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk alamiah untuk sebuah kehidupan politik atau sebuah politik kebinatangan. Dengan kata lain, kehidupan di dalam negara tidak datang secara alamiah. Pandangan Aristoteles didasarkan pada ide *eudaimonia* atau *happiness* (kebahagiaan) dimana individu selalu melihat kebaikan tertinggi. Hobbes mempertahankan situasi pra sejarah bahwa dalam *state of nature*, manusia memiliki hak untuk melakukan hal terbaik bagi dirinya untuk mendapatkan kebaikan tertinggi.¹⁶

Pertanyaan yang muncul adalah apakah kebahagiaan (*vain, glory, dan greed*) yang diinginkan oleh individu tersebut sama dengan yang diinginkan oleh individu lainnya? Hobbes mengatakan bahwa setiap individu memiliki hasrat sebagai anti sosial dan bahkan individu yang satu memiliki

¹⁵Juhani Pietarinem, *op. cit.*, h. 1.

¹⁶Thomas Hobbes, *De Cive, op. cit.*, h. 18

kecenderungan untuk konflik dengan individu lainnya. Ada tiga prinsip penyebab pertengkaran dalam pandangan Hobbes. *Pertama, competition* (kompetisi), yaitu para individu menyerbu untuk mendapatkan sesuatu. Mereka menggunakan kekerasan untuk menguasai pribadi dan milik orang lain. *Kedua, mistrust* (ketidakpercayaan), yaitu para individu berselisih untuk menyelamatkan atau mempertahankan milik mereka atau istri-istri, anak-anak, dan ternak mereka. *Ketiga, glory* (kejayaan), yaitu individu-individu berselisih untuk hal-hal sepele, seperti sebuah kata, senyuman, perbedaan pandangan, dan lain-lain sebagainya. Mereka berselisih terhadap hal-hal sebagai tanda bahwa individu yang satu meng-*underestimate* individu lainnya.¹⁷

Dalam *De Cive*, Hobbes mengemukakan dasar asumsinya tentang *human nature* (manusia alamiah) sebagai makhluk individu *distrust and dread each other*¹⁸ (rasa tidak percaya dan rasa takut antara satu individu dengan individu lainnya). Dalam kaitan ini, Hobbes mengemukakan beberapa pengalamannya sebagai berikut: *Pertama*, negara-negara berupaya mempertahankan diri dari serangan tetangganya. *Kedua*, para individu dilatih menjadi tentara, termasuk negara-negara hukum, dan mengunci pintu-pintu mereka dengan baik untuk menjaga para pencuri dalam masyarakat. *Ketiga*, seseorang tidak dapat membedakan antara yang jahat dan yang berbudi. Yang paling krusial menurut Hobbes adalah poin ketiga, sebab sebagai makhluk alamiah, manusia tidak memiliki pengetahuan tentang individu lainnya. Kita mengetahui beberapa individu yang jahat dan saling bermusuhan, tetapi kita tidak selamanya dapat mendeteksi individu mana yang jahat.¹⁹

IV. Pandangan Hobbes tentang Konsep Civil Society

Karya Hobbes yang mendiskusikan tentang civil society adalah *De Cive: Philosophical Rudiments Concerning Government and Civil Society*. Buku ini mendiskusikan tentang elemen-elemen kebijakan civil tentang persetujuan dalam hal hukum-hukum alamiah dan hukum-hukum kellaian dengan mendemonstrasikan asal-usul keadilan. Meskipun Hobbes selalu memandang manusia dari sisi negatif, namun ia memiliki pandangan tersendiri tentang konsep civil society. Pandangan Hobbes tentang civil society bukan saja bertentangan dengan Iqbal yang meletakkan prinsip dasarnya dari Alquran dan hadis, tetapi juga filsuf sezaman dan senegaranya John Locke memiliki pandangan yang sangat kontroversi. Locke sangat menentang sistem kenegaraan monarki absolut sebab bertentangan dengan prinsip civil society.²⁰ Sementara itu, Hobbes sangat merekomendasikan sistem kenegaraan monarki absolut, sebab hanya melalui pemerintahan yang kuat negara akan aman yang pada gilirannya civil society juga ikut aman. Kesamaan pandangan Hobbes dan

¹⁷Lihat J.P. De Lucca, Thomas Hobbes, *op. cit.*, h. 5

¹⁸Lihat Thomas Hobbes, *De Cive, op.cit.*, h. 90

¹⁹Marshall Missner, Skopticism and Hobbes's Political Philosophy, *Journal of the History of Ideas*, Vol. 44, No. 3 (July - Sep., 1983), h. 407-427

²⁰Lihat Muhammad Saleh Tajuddin & Ismah Tita, *op. cit.*, h. 82

Locke adalah penolakan mereka terhadap sistem monarki absolut yang eksis di zaman mereka, dimana raja dianggap sebagai perwakilan Tuhan.

Dari fenomena tersebut, Hobbes menarik dua kesimpulan: *Pertama*, menata masyarakat dalam prinsip-prinsip normatif, seperti tuntutan moral dan agama adalah mustahil. Prinsip-prinsip tersebut hanya dikemukakan sebagai kedok untuk menutupi nafsu-nafsu yang rendah. *Kedua*, masyarakat hanya dapat ditata dalam perdamaian, apabila pengaruh emosi dan nafsu dapat dielakkan.²¹ Di sinilah perbedaan mendasar antara Hobbes dan Iqbal, sebab Iqbal menjadikan ajaran Islam sebagai dasar untuk menata masyarakat. Menurut Hobbes, civil society itu ada dua, yaitu primitif dan modern.

4. 1. Primitif Civil Society

Menurut Hobbes, otoritas politik itu adalah artifisial, dalam arti kata merupakan kreasi manusia, bukan ciptaan Tuhan, sebab dalam kondisi "alamiah" bentuk pemerintahan itu lemah. Hobbes mengilustrasikan manusia yang lahir adalah berada dalam kondisi alamiah, sehingga kondisinya sangat lemah, tidak memiliki power dan harus diurus oleh ibunya.²² Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kekuatan? Descartes menjelaskan bahwa sebuah kekuatan yang aktif atau tendensi badan untuk bergerak pada dasarnya adalah ekspresi dari kekuatan Tuhan. Ia membedakan antara *motion* (gerakan) dan tendensi untuk bergerak, meskipun Hobbes dengan ragu-ragu mengomentari bahwa *conatus* sebenarnya adalah *motion* (gerakan).²³ Hal ini berbeda dengan pandangan Hobbes yang mengatakan bahwa *power* (kekuatan) manusia itu tercipta dari upaya manusia lewat motivasinya dan tidak ada campur tangan Tuhan.

Hobbes menegaskan bahwa sepanjang manusia belum sukses mengatur bentuk pemerintahan, maka masyarakat masih akan hidup dalam kondisi negara alamiah. Sebuah negara yang berada dalam kondisi alamiah maka secara otomatis civil society masih berada dalam kondisi alamiah. Hobbes memberi contoh situasi Indian Amerika pada abad ke-17 berada dalam kondisi masyarakat primitif. Bahkan Hobbes menambahkan bahwa negara alamiah dengan masyarakat primitif juga terjadi di Inggris pada abad ke-17, karena selalu terjadi perang civil, perang agama, dan kekacauan terjadi di mana-mana. Hobbes juga memberi contoh kondisi masyarakat primitif yang boleh saja terjadi pada masyarakat modern di mana-mana, misalnya polisi tidak mau mengerjakan tugasnya karena ulah pemerintah.²⁴ Jadi, kategorisasi yang dilakukan oleh Hobbes terhadap civil society primitif dan modern bukan dari persoalan waktu, tetapi dari kondisi masyarakat dan negara yang dialaminya kapan pun dan di mana pun dapat terjadi.

²¹Lihat Frans Magnis Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: Gramedia; 1994).

²²Lihat Garrath Williams, Hobbes: Moral and Political Philosophy, *Internet Encyclopaedia of philosophy: A Peer Reviewed Academic Resources*, Lanchaster University, 21 Mey 2003, h. 3

²³Lihat Juhani Pietarinen, Hobbes, Conatus and Prisoner Dilemma, IIAIAEIA, 2001, h. 1

²⁴Lihat Thomas Hobbes, *Leviathan, op. cit.*, h. 115

Hobbes mengatakan bahwa pada dasarnya, kondisi alamiah manusia memiliki derajat fakultas bodi dan pikiran yang sama, meskipun kadang kala kita menemukan beberapa manusia memanifestasikan kekuatannya, fisik dan kecermatan pikirannya mengungguli manusia lainnya. Antara manusia satu dan manusia lainnya dalam masyarakat selalu berkompetisi, baik dalam hal positif maupun negatif. Kompetisi ini selalu berujung dengan konflik, bahkan peperangan. Semua manusia, baik yang kuat maupun yang lemah masing-masing memiliki potensi untuk saling membunuh. Yang dianggap manusia lemah pun dapat membunuh manusia yang kuat.²⁵

4. 2. Modern Civil Society

AS Hikam menjelaskan bahwa Hobbes tidak membedakan antara konsep civil society dan negara karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Negara dan civil society harus memiliki kekuasaan absolut terhadap warga. Konsep ini muncul dalam pikiran Hobbes, karena warga negara memerlukan sebuah entitas baru yang dapat meredam konflik, sehingga warga negara tidak saling menghancurkan.²⁶ Analisis ini memang masuk akal, sebab Hobbes tidak membedakan secara tajam antara negara dan civil society. Hobbes menjelaskan bahwa negara lahir dari warga negara atau individu yang ingin menciptakan kedamaian dari sifat alamiah manusia, sehingga menjalin kontrak dengan sesama individu. Terjalannya kontrak antar sesama individu ini, maka lahirlah civil society, kemudian masyarakat menyerahkan kepemimpinan secara absolut kepada seseorang atau majelis, maka lahirlah negara yang kuat. Namun, tampaknya Hobbes tetap membedakan negara dan civil society meskipun tidak begitu tajam, sebab civil society ini berfungsi sebagai alat pengontrol kesewenang-wenangan raja atas intrest pribadi.

Hobbes memandang civil society modern sebagai pihak yang dilawankan dengan hukum alam atau sifat alamiah manusia. Menurut hukum alam, manusia tidak dapat diatur dan masing-masing mengejar kepentingan yang berbeda. Dalam kondisi seperti itu, manusia secara terus-menerus dimotivasi untuk mewujudkan kebutuhannya yang tidak hanya berorientasi pada masa kini, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia membutuhkan kekuatan (*power*) dan instrumen yang dapat digunakan untuk menunjukkan otoritasnya. Setiap kali manusia berusaha merealisasikan keinginannya, maka setiap individu akan berbagi kepentingan yang sama. Untuk mencapai kebutuhan hidup.²⁷

Otoritas kekuasaan yang semakin diperbesar oleh individu akan menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat. Ketakutan tersebut akan menimbulkan ketidakpercayaan yang berakibat pada kemunculan *mutual*

²⁵Lihat *ibid.*, h. 114

²⁶Lihat AS. Hikam, *Islam Demokrasi dan Pemberdayaan Civil Society* (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 116

²⁷Lihat Syamsul Hadi dkk., *Perkembangan Wacana Civil Society, Jurnal Civic*, Vol. 1, No. 3, Desember 2003, h. 79

violence antara satu kelompok masyarakat untuk mengalahkan kelompok lain. Apabila situasi ini berlangsung terus, maka manusia akan mengalami situasi hidup dalam tendensi deskruktif. Di sisi lain setiap manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tujuan hidupnya. Namun, hak tersebut hanya akan terbentuk ketika ada batasan dan hambatan tertentu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Individu dipaksa untuk patuh dan taat pada hukum tertentu yang disebut *civic virtue*. Kepatuhan tersebut harus diproyeksikan untuk pencarian atas situasi perdamaian dan jaminan atas hak orang lain. Perdamaian ini dilakukan melalui pembuatan kontrak berdasarkan proses pertukaran yang mereka lakukan sehingga jaminan terhadap kepentingan individu bisa dilaksanakan²⁸

Dalam kaitannya dengan negara dan civil society, Hobbes mengakui bahwa kebebasan manusia adalah hak yang tidak boleh dilanggar. Namun, untuk menjaga keseimbangan kepentingan, negara memiliki hak untuk mencampuri kehidupan masyarakat. Negara menganggap bahwa intervensi yang dilakukan adalah hak alamiahnya, karena memiliki alat kekuasaan yang dapat digunakan untuk menjamin dan menyiapkan kedamaian di antara anggota masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya, prioritas sebuah negara adalah memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak warga negaranya. Sementara itu, civil society memegang peranan dalam menjalankan fungsi asosiatif terhadap berbagai kepentingan masyarakat. Civil society sebagai kumpulan kepentingan individu merupakan kekuatan yang dapat digunakan untuk mengontrol kekuatan negara, karena dalam civil society terdapat kesamaan kepentingan yang berarti individu telah siap memasuki kehidupan masyarakat yang beradab (tunduk kepada *civic virtue* tertentu).²⁹

Pandangan Hobbes terhadap civil society modern sangat berbeda dengan civil society primitif yang selalu dalam kondisi kacau. Dalam situasi civil society modern, setiap individu memiliki kenyamanan hidup dan terjadi tatanan kehidupan sosial yang sangat aman. Untuk mengubah situasi dalam kondisi primitif ke modern, Hobbes memiliki kesamaan pandangan dengan Iqbal, dengan cara peningkatan kualitas individu melalui pendidikan. Hobbes mengatakan bahwa individu yang satu dengan individu lainnya memiliki kesamaan karakter, misalnya hasrat, ketakutan, harapan, dan lain-lain. Melalui konstitusi-konstitusi individu, khususnya pendidikan, mereka dapat memperoleh ilmu pengetahuan.³⁰

V. Penutup

Konsep civil society Thomas Hobbes diawali dengan konsep manusia, terutama konsep diri. Hobbes melihat bahwa manusia adalah makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional, anarkis, saling iri, serta benci sehingga menjadi jahat, buas, dan kasar, sebab ia memandang manusia sebagai

²⁸Lihat *ibid.*

²⁹Lihat *ibid.*, h. 80

³⁰Lihat Thomas Hobbes, *Leviathan, op. cit.*, h. 3

naluri kebinatangan yang digerakkan oleh nafsunya sebagai tumpukan material mekanik yang menggerakkan manusia sekaligus sebagai sumber pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman manusia.

Hobbes menegaskan bahwa sepanjang manusia belum sukses mengatur bentuk pemerintahan, maka masyarakat masih akan hidup dalam kondisi negara alamiah. Sebuah negara yang berada dalam kondisi alamiah maka secara otomatis civil society masih berada dalam kondisi primitif. Sebaliknya, Hobbes memandang civil society modern sebagai pihak yang dilawankan dengan hukum alam atau sifat alamiah manusia. Hobbes menjelaskan bahwa negara lahir dari warga negara atau individu yang ingin menciptakan kedamaian dari sifat alamiah manusia sehingga menjalin kontrak dengan sesama individu. Terjalannya kontrak antar sesama individu ini maka lahirlah civil society, kemudian masyarakat menyerahkan kepemimpinan secara absolut kepada seseorang atau majelis, maka lahirlah negara yang kuat. Gambaran ini adalah ciri dari kategori civil society modern.

KEPUSTAKAAN

- AS. Hikam, *Islam Demokrasi dan Pemberdayaan Civil Society* (Jakarta: Erlangga, 2000).
- Gelner, Ernest. *The Condition of Liberty: Civil Society and Its Rivals* (London: Penguin, 1994).
- Jean L. Cohen dan Andrew Arato, *Civil Society dan Political Theory* (Massachusetts: MIT Press, 1992).
- J.P. De Lucca, Thomas Hobbes, Quaderno Filsufi and Classici. www.swif.it.
- Pietarinem, Juhani. Hobbes, Conatus and Prisoner's Dilemma, IIAIAEIA University of Turku, Finland, <http://www.thomas-hobbes/conatus-and-prisoner-dilemma.htm>.
- Missner, Marshall. Skopticism and Hobbes's Political Philosophy, *Journal of the History of Ideas*, Vol. 44, No. 3 (July - Sep., 1983).
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik* (Jakarta: Gramedia; 1994).
- Pietarinen, Juhani. Hobbes, Conatus and Prisoner Dilemma, IIAIAEIA, 2001.
- Syamsul Hadi dkk., Perkembangan Wacana Civil Society, *Jurnal Civic*, Vol. 1, No. 3, Desember 2003.
- Williams, Garrath. Hobbes: Moral and Political Philosophy, *Internet Encyclopeia of philosophy: A Peer Reviewed Academic Resources*, Lanchaster University, 21 Mey 2003.
- Wook, Ellen Meiksin. *Democracy Against Capitalism: Renewing Historical Materialism* (Cambridge University Press, 1995).